

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LITERATURE**

- Abduh dan Yahya, Al-Milkiyah fi Al-Islam, Hal 138.
- Al-Maliki, As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mustla, Hal 51.
- Al-Nabhani, An-Nizham Al- Iqtishadi fi Al-Islam, Hal 73-128.
- Budiono, Herlien. *Perwakilan, Kuasa dan Pemberian Kuasa Renvoi 6.42.IV*, 2006.
- Chomzah, H. Ali Achmad. *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003.
- Gani, Abdul. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendayagunaan Lahan Kosong*, Tesis Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2002.
- Harsono, Boedi. *Beberapa Analisis Tentang Hukum Agraria II*, Penerbit Esa Studi Klub, Jakarta, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Mahasari, *Pertanahan dalam Hukum Islam*. Hal 39.
- Parlindungan, AP, *Pendaftaran Tanah dan Konfersi Hak Milik Atas Tanah menurut UUPA*, Alumni, Bandung, 1988.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria & Hak – Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Soekanto, Soerjono, Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, 2006.

Soimin, Soedharyo. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Edisi Kedua, Sinar Grafik, Jakarta, 2004.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sutedi, Adrian. *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, Cipta Jaya, Jakarta, 2006.

\_\_\_\_\_, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Wargakusumah, Hasan. *Hukum Agraria I*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah : Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.